Tinjauan Perencanaan Tingkat Desa Di Desa Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju

Rahmat Kaco¹, Rajab²

^{1,2}Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Mamuju

¹Email: rakatutar1973@gmail.com

²Email: rajab.daeng@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Desa Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan perencanaan tingkat desa di desa Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju dan untuk mengetahui dasar dalam perencanaan tingkat desa di desa Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju.. Hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah RPJM-Desa Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat Tahun 2015-2021 ditetapkan dengan peraturan desa yang memuat kebijakan dan pokok – pokok rencana pembangunan desa yang memuat kebijakan dan pokok-pokok rencana pembangunan desa yang bersifat strategis untuk menjadi aturan penyusunan RKP Desa dan untuk mewujudkan visi dan misi Desa Labuang Rano maka penjabaran RPJM-Desa secara operasional dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya dijabarkan kedalam bentuk program dan kegiatan kongkrit, terarah, transparan dan penuh tanggung jawab.

Kata kunci: Perencanaan Tingkat Desa, Ekonomi dan Pembangunan

Abstract

This research was conducted in Labuang Rano Village, West Tapalang Subdistrict, Mamuju Regency. The purpose of this study was to determine the implementation of village-level planning in Labuang Rano Village, West Tapalang Subdistrict, Mamuju Regency and to determine the basis for village-level planning in Labuang Rano Village, West Tapalang Subdistrict, Mamuju Regency. The results obtained in this study are that the Labuang Rano Village RPJM-Village, West Tapalang District 2015-2021 is stipulated by village regulations which contain policies and main village development plans which contain policies and main village development plans that are strategic in nature to become rules for preparing the Village RKP and to realize the vision and mission of Labuang Rano Village, the elaboration of the RPJM-Village is operationally outlined in the Village Government Work Plan which is further elaborated in the form of concrete, directed, transparent and responsible programs and activities.

Keywords: Village Level Planning, Economy and Development

Tinjauan Perencanaan Tingkat Desa Di Desa Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju

PENDAHULUAN

Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan secara terencana dengan baik dan harus menyentuh kebutuhan riil masyarakat desa. Sehingga pembangunan yang dilakukan di kawasan pedesaan dapat membunmi dengan masyarakatnya dan tidak mengawang-awang. Artinya, pembangunan desa harus terencana Otonomi daerah dengan baik berdasarkan hasil analisis atau kajian yang menyeluruh terhadap segenap potensi (kekuatan dan peluang) dan permasalahan (kelemahan dan hambatan/ ancaman) yang dihadapi desa. Hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang ada dan mungkin akan muncul di masa mendatang inilah yang menjadi bahan dasar bagi perencanaan dan program pembangunan desa di masa mendatang dengan melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat. Untuk mewujudkan pembangunan desa yang terencana, maka pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat harus terlibat dalam proses perencanaan pembangunan. Bentuk perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) desa dan Rencana Kerja Tahunan (RKT), merupakan beberapa contoh perencanaan pembangunan tersebut. Desa memegang peranan penting dalam pembangunan nasional. Bukan hanya dikarenakan sebagian besar rakyat Indonesia bertempat tinggal di desa, tetapi desa memberikan sumbangan besar dalam menciptakan stabilitas nasional. Pembangunan desa adalah merupakan bagian dari rangkaian pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan secara berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Pemerintah menyadari akan pentingnya pembangunan di tingkat desa. Berbagai bentuk dan program untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan pedesaan telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya masih belum signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, mewajibkan kepada Pemerintah Desa untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program, dengan memperhatikan RPJMD, program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah merupakan dokumen perencanaan pemerintahan desa untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMDes juga merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Desa yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang) Desa dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMDes memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program. Dalam perencanaan pembangunan desa LPMD merupakan mitra kerja dari pemerintah desa. Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa mempunyai peran penting dalam pembangunan desa. Kepala desa yang mempunyai kedudukan sebagai pimpinan Pemerintah Desa dan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Sedangkan Perangkat Desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan, unsur wilayah. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi yang keanggotaannya terdiri dari unsur ketua RW, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh-tokoh masyarakat. Keberhasilan Perencanaan pembangunan desa tidak lepas dari adanya dukungan berbagai pihak baik memperhatikan Rencana Strategis (renstra) Kecamatan dan Rencana pemerintah desa maupun lembaga desa. Lembaga pemberdayaan masyarakat desa yang dalam hal ini sebagai mitra pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pelestarian

Tinjauan Perencanaan Tingkat Desa Di Desa Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju

pembangunan tentunya perlu menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah desa. Berdasarkan latar belakang permasalahan tentang perencanaan pembangunan desa maka perlu kiranya kajian yang lebih dalam. Dengan demikian penulis pun tertarik untuk mengkaji lebih dalam dengan meninjau perencanaan tingkat desa khususnya di desa Labuang Rano Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju. Untuk itu penulis bermaksud mengadakan sebuah penelitian ilmiah dengan judul “Tinjauan Perencanaan Tingkat Desa Di Desa Labuang Rano Kecamatan Tapalang Kabupaten Mamuju”.

KAJIAN TEORI

Pengertian Perencanaan

Conyers & Hills (1994:53) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang bersinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Perencanaan merupakan alat pengalokasian sumberdaya.

Penggunaan istilah "sumberdaya" di sini menunjukkan segala sesuatu yang dianggap berguna dalam pencapaian suatu tujuan tertentu. Sumberdaya di sini mencakup sumberdaya alam (tanah, air, hasil tambang, dan sebagainya), sumberdaya manusia, sumberdaya modal, dan keuangan. Perencanaan mencakup proses pengambilan keputusan tentang bagaimana penggunaan sumberdaya yang tersedia sebaik-baiknya. Oleh karena itu, kuantitas dan kualitas sumber daya tersebut berpengaruh sangat penting dalam proses memilih di antara berbagai pilihan tindakan-tindakan yang ada.

Pengertian Pembangunan

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga. Ini adalah persoalan yang menyangkut sampai berapa jauh informasi yang kita miliki mengenai pembangunan, apabila kita tidak mengerti arti inti dari pembangunan itu. Menurut Sondang P Siagian, (1981:21) mendefinisikan pembangunan adalah: “Suatu usaha atas rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah dalam usaha pembinaan bangsa.”^{xix} Berdasarkan pendapat

Berdasarkan pendapat tersebut, maka dalam konsep pembangunan terdapat dua syarat yang harus dipenuhi yakni: harus ada usaha yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintahnya, dilaksanakan secara sadar, terarah dan berkesinambungan agar tujuan dari pembangunan itu dapat tercapai. Dari beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan tersebut, bahwa pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam suasana kehidupan yang penuh harmonis. Tiap-tiap negara mengejar pembangunan adalah suatu tujuan bahwa semua orang turut mengambil bagian. Sedangkan kemajuan ekonomi adalah suatu komponen yang esensial dari pembangunan itu, walaupun bukan satusatunya. Hal ini disebabkan pembangunan itu bukanlah semata-mata fenomena ekonomi. Dalam pengertian yang paling mendasar, pembangunan itu haruslah mencakup masalah-masalah materi dan finansial dalam kehidupan orang. Karena itu, pembangunan seharusnya diselidiki sebagai suatu proses multidimensional yang melibatkan reorganisasi dan reorientasi dari semua sistem ekonomi dan sosial. Sebagai tambahan, terhadap perbaikan-perbaikan di bidang penghasilan dan *out put*, khususnya diadakan perombakan-perombakan yang radikal dalam lembaga-lembaga, struktur dan administrasi, begitupun dalam sikap-sikap mental dan bahkan banyak pula harus mengubah adat kebiasaan dan kepercayaan. Akhirnya walaupun pembangunan itu biasanya ditetapkan atau diarahkan dalam konteks nasional, realisasinya yang luas bisa memaksa modifikasi fundamental ekonomi internasional, begitupun sistem sosialnya.

Akan tetapi, sebelum mengadakan analisa mengenai kompleksitas pembangunan, kita mulai dulu dengan membahas dua macam pendekatan konseptual yang penting mengenai studi atau telaah pembangunan ekonomi. Kemudian kita akan meninjau kembali dua pengertian yang penting, yaitu dualisme dan masyarakat ganda. Pembangunan juga merupakan proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan sehingga pembangunan adalah proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

Perencanaan Pembangunan

Tinjauan Perencanaan Tingkat Desa Di Desa Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, pasal 2 (ayat 3) menyatakan bahwa RPJMDes memuat arah kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, dan program kerja desa. RPJMDes sebagai suatu rencana pembangunan desa harus melibatkan segenap komponen masyarakat desa didalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasannya. Rencana pembangunan desa semestinya menerapkan prinsip-prinsip :

- a. Pemberdayaan, yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Partisipatif, yaitu ke ikut sertaan dan keter libatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan;
- c. Berpihak kepada masyarakat, yaitu seluruh proses pembangunan di pedesaan secara serius memberikan kesempatan yang seluasluasnya bagi masyarakat khususnya masyarakat miskin;
- d. Terbuka, yaitu setiap proses tahapan perencanaan pembangunan dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh seluruh masyarakat desa;
- e. Akuntabel, yaitu setiap proses dan tahapan-tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan benar, baik pada pemerintah di desa maupun pada masyarakat;
- f. Selektif, yaitu semua potensi dan masalah terseleksi dengan baik untuk mencapai hasil yang optimal;
- g. Efisiensi dan efektif, yaitu pelaksanaan perencanaan kegiatan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia;
- h. Keberlanjutan, yaitu setiap proses dan tahapan kegiatan perencanaan harus berjalan secara berkelanjutan;
- i. Cermat, yaitu data yang diperoleh cukup objektif, teliti, dapat dipercaya, dan menampung aspirasi masyarakat;
- j. Proses berulang, yaitu pengkajian terhadap sesuatu masalah/hal dilakukan secara berulang sehingga mendapatkan hasil yang terbaik;
- k. Penggalian informasi, yaitu di dalam menemukan masalah dilakukan penggalian informasi melalui alat kajian keadaan desa dengan sumber informasi utama dari peserta musyawarah perencanaan atau sumber informasi utama dari masyarakat.

Pada haketnya Perencanaan merupakan suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadiseperti peristiwa, keadaan, suasana dan sebagainya. Perencanaan bukanlah masalah kira-kira, manipulasi atau teoritis tanpa fakta atau data yang kongkrit melainkan persiapan perencanaan harus dinilai. Pembangunan Jangka Panjang boleh dikatakan telah berhasil meletakkan landasan yang kuat bagi pembangunan Jangka Panjang berikutnya.

Adapun tujuan Pembangunan Jangka Panjang adalah mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri, sejahtera lahir batin dalam rangka mewujudkan masyarakat adil makmur dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Rumusan yang luas tersebut dapat kita sebut tujuan normatif atau visi normatif dari pembangunan nasional. Dalam rangka pencapaian tujuan normatif Pembangunan Jangka Panjang tersebut di rumuskan pula sebagai sasaran umum ialah terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia yang maju dan mandiri. Masyarakat semakin berkembang, semakin cerdas dan semakin luas pula horison pilihannya sebagai hasil sumber daya manusia Indonesia.

Definisi Pembangunan Daerah

Menurut Myrdal, Hirschman (1958) dalam Lincoln Arsyad 2010:380 mengatakan bahwa jika suatu daerah mengalami perkembangan, maka perkembangan itu akan membawa pengaruh atau imbas kedaerah lain. Menurut Hirschman, daerah disuatu negara dapat dibedakan menjadi dua, yaitu daerah kaya dan daerah miskin. Jika perbedaan antara kedua daerah tersebut semakin menyempit berarti terjadi efek tetes ke bawah (*trickling down effects*). Sedangkan jika perbedaan antar kedua daerah tersebut semakin melebar berarti terjadi proses pengkutuban (*polarization effects*). Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa jika proses perekonomian diserahkan kepada mekanisme pasar, maka akan membawa akibat-akibat yang kurang menguntungkan baik bagi daerah-daerah terbelakang maupun daerah-daerah maju dan pada akhirnya justru dapat mengganggu kestabilan ekonomi negara secara keseluruhan.

Tahap-tahap perencanaan pembangunan daerah

Menurut Blakely (1989) dalam Lincoln Arsyad (2010 : 383- 384) ada enam tahap dalam poses perencanaan pembangunan ekonomi daerah yaitu:

- a. Pengumpulan dan analisis data

Tinjauan Perencanaan Tingkat Desa Di Desa Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju

- ✓ Penentuan Basis Ekonomi
- ✓ Analisis Struktur tenaga Kerja
- ✓ Evaluasi kebutuhan tenaga kerja
- ✓ Analisis peluang dan kendala pembangunan
- ✓ Analisis kapasitas kelembagaan
- b. Pemilihan strategi pembangunan daerah
 - ✓ Penentuan tujuan dan kriteria
 - ✓ Penentuan kemungkinan-kemungkinan tindakan
 - ✓ Penyusunan strategi
- c. Pemilihan proyek-proyek pembangunan
 - ✓ Identifikasi proyek
 - ✓ Penilaian viabilitas proyek
- d. Pembuatan rencana tindakan
 - ✓ Prapenilaian hasil proyek
 - ✓ Pengembangan infut proyek
 - ✓ Penentuan alternatif sumbe pembiayaan
 - ✓ Identifikasi struktur proyek
- e. Penentuan rician proyek
 - ✓ Pelaksanaan studi kelayakan secara rinci
 - ✓ Penyiapan rencana usaha (Business plan)
 - ✓ Pengembangan, monitoring, dan pengevaluasian program
- f. Persiapan perencanaan secara keseluruhan dan implementasi
 - ✓ Penyiapan skedul implementasi rencana proyek
 - ✓ Penyusunan program pembangunan secara keseluruhan
 - ✓ Targeting dan marketing aset-aset masyarakat
 - ✓ Pemasaran kebutuhan keuangan

Ada empat peran yang dapat diambil oleh pemerintah daerah dalam proses pembangunan ekonomi daerah, yaitu sebagai *entrepreneur*, koordinator, fasilitator, dan stimulator bagilahirnya inisiatif-inisiatif pembangunan daerah.

Pengertian Pembangunan Desa

Pembangunan dapat diartikan sebagai salah satu usaha sadar dalam serangkaian kegiatan untuk mencapai kebutuhan dari keadaan yang buruk menuju kekeadaan yang lebih baik yang dilakukan oleh masyarakat tertentu disuatu negara. Menurut Kartasmita (2001 : 66) mengatakan bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraannya. Dalam pembangunan, peran serta seluruh lapisan masyarakat selaku pelaku pembangunan dalam pemerintah selaku pengayom, pembina dan pengarah sangat diperlukan. Antara masyarakat dan pemerintah harus berjalan seiring, saling mengisi, melengkapi dalam satu kesatuan gerak pembangunan guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Ciri-ciri dan prinsip pembangunan desa

Pembangunan desa dengan berbagai masalahnya merupakan pembangunan yang berlangsung menyentuh kepentingan bersama. Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari pembangunan nasional indonesia. Oleh karena itu, pembangunan desa tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan pemerintah maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam merealisasikan pembangunan desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas pembangunan desa itu sendiri, seperti yang dikemukakan oleh C.S.T Kansil, (1983:251) yaitu: Komprehensif multi sektoral yang meliputi berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun aspek keamanan dengan mekanisme dan sistem pelaksanaan yang terpadu antar berbagai kegiatan pemerintahan dan masyarakat. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional dengan kebutuhan essensial kegiatan

Tinjauan Perencanaan Tingkat Desa Di Desa Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju

masyarakat. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di wilayah kelurahan. Satu kesatuan pola dengan pembangunan nasional dan regional dan daerah pedesaan dan daerah perkotaan serta antara daerah pengembangan wilayah sedang dan kecil. Menggerakkan partisipasi, prakaras dan suadaya gotong royong masyarakat serta mendinamisir unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat waktu. Jadi didalam merealisasikan pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek, jangan dari satu aspek saja, agar pembangunan desa itu dapat sesuai dengan apa yang diinginkan. Pembangunan desa itu harus meliputi berbagai aspek kehidupan dan penghidupan artinya harus melibatkan semua komponen yaitu dari pihak masyarakat dan pemerintah, dan harus langsung secara terus menerus demi tercapainya kebutuhan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, adalah tehnik analisis data kualitatif, tanpa menggunakan alat bantu rumus statistik. Pengelolaan dan penganalisaan data yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif menekankan pada segi pengamatan langsung secara partisipatif dari penelitian. Dengan demikian dapat diungkapkan fenomena-fenomena yang terjadi serta hal-hal yang melatar balakanginya yang pada akhirnya akan menghasilkan gambaran yang jelas, terarah dan menyeluruh dari masalah yang menjadi objek penelitian.

Dalam penelitian ini data yang didapatkan dari wawancara yang diperoleh dari responden, disajikan dalam pertanyaan bentuk pertanyaan betuk tabel yang memuat jawaban-jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan. Sehingga peneliti mengerti kecenderungan jawaban responden untuk dianalisis berdasarkan argumen logika. Sedangkan data yang diperoleh melalui studi pustaka, dan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang berkaitan dengan aspek-aspek yang diteliti. Oleh karena analisis dari penelitian kualitatif tidak mendasarkan interpretasi datanya pada perhitungan-perhitungan seperti analisis data penelitian kuantitatif, maka analisis data terletak pada kemampuan nalar peneliti dalam menghubungkan data, fakta, dan informasi yang diperoleh oleh peneliti itu sendiri. (Ali, 2007:151) Untuk menganalisis tinjauan perencanaan tingkat desa, tugas dan fungsi perencanaan tingkat desa yang ada di Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju khususnya di Desa Labuang Rano (Tempat Kantor Desa Labuang Rano) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Observasi

Hasil observasi yang peneliti dapat kan adalah Kondisi sarana prasarana baik listrik ataupun perumahan sudah cukup baik, tetapi kondisi fasilitas kesehatan dan pendidikan kurang menunjang, dan air bersih yang ada masih kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

a. Jalan

Dari hasil pengamatan di lapangan Desa labuang rano memiliki jalan liku-liku seperti banyak masyarakat menamakan jalan ss, dengan jalan utama yang merupakan jalan lokal primer. Dari keadaan pola jaringan jalan yang ada bila ditinjau secara lokal dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu:

1. Jaringan jalan lokal primer, yaitu jaringan jalan Kabupaten yang menghubungkan antara Desa labuang rano dengan Kecamatan tappalang barat.
2. Jaringan jalan sekunder, adalah jaringan jalan yang menghubungkan antar pedukuhan di Desa labuang rano
3. Jaringan jalan lingkungan, yaitu jalan kampung yang berada di dalam satu blok lingkungan, baik yang menghubungkan antar satuan lingkungan (RW/RT) ataupun dalam satu satuan lingkungan yang bisa berupa gang masuk lingkungan perumahan. Prioritas rencana pembangunan jalan adalah pengaturan dan pengembangan jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder yang ada di Desa Kalibakung, sehingga mampu merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi masyarakat.

b. Air Bersih

Berdasarkan data yang ada, Desa labuang rano belum mendapatkan pelayanan air bersih yang terkelola dengan sistem jaringan perpipaan (PDAM). Kebutuhan air bersih didapatkan dari sumur dan sumber mata air. Dari hasil tinjauan lapangan dan pengamatan langsung terdapat beberapa

Tinjauan Perencanaan Tingkat Desa Di Desa Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju

sumber air bersih yang bisa dimanfaatkan baik untuk air minum maupun air irigasi, tetapi belum dioperasikan karena beberapa alasan, mekanisme penyaluran dan pengelolannya, jaringan yang belum memadai serta permasalahan pompa yang belum ada sehingga membutuhkan dana yang cukup besar. Apabila dikembangkan lebih lanjut bisa dimanfaatkan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih, disamping sumber lain. Dalam pengembangannya, penyediaan air bersih yang terkelola diprioritaskan pada daerah-daerah di sekitar jalan utama, sedang selebihnya dipertimbangkan pengembangannya. Kebutuhan air bersih saat ini dari sumur gali relatif sudah memadai, pengembangan jaringan air bersih yang direncanakan adalah untuk mengantisipasi pertambahan kebutuhan air bersih karena bertambahnya jumlah penduduk.

c. Listrik

Rencana penyediaan listrik di Desa Labuang Rano sudah meliputi kebutuhan penduduk yang sampai saat ini bias di nikmati aliran listrik nya

d. Perumahan

Keadaan struktur dan kualitas bangunan rumah di Desa Labuang Rano dapat diklasifikasikan menjadi 2 jenis, yaitu bangunan permanen (berdinding tembok) dan bangunan sederhana/tidak permanen (berdinding kayu dan bambu).

2. Interview

Adapun hasil interview yang peneliti dapat kan. Tentang perencanaan pembangunan di desa Labuang Rano adalah :

Desa Labuang Rano sebagai salah satu desa di kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju yang memiliki berbagai macam potensi dan masalah, Pemerintah Desa sesuai dengan bidang tugasnya melaksanakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, berkewajiban juga menyusun rencana Pembangunan. Dengan demikian diharapkan agar dapat menentukan arah perkembangan dalam meningkatkan kinerjanya, yang mampu menjawab tuntutan perkembangan baik lokal, regional, nasional, maupun global. Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera dilaksanakan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (good governance) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Sebagai aplikasi dan uraian di atas, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan yang memuat rencana kerja lima tahunan yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang dikenal dengan RPJM-DES Desa Labuang Rano Tahun 2015-2021. Rencana pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 5 (Jima) tahun yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD dan program prioritas kewilayahan disertai rencana kerja.

Rencana tersebut harus mempunyai kebijakan, strategi dan program pembangunan yang dapat mensinergikan sumber daya dan potensi dengan peluang pengembangan wilayah yang dimiliki. Sumber daya tersebut bersifat spesifik lokal yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, serta sumber-sumber pendapatan daerah yang potensial. Dengan dilaksanakannya penyusunan RPJMDes di Desa Labuang Rano ini, diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat dalam rangka akselerasi pembangunan daerah.

Adapun Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) adalah:

- a. Mewujudkan Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang partisipatif, akuntabel, transparansi, demokratis sesuai situasi dan kondisi setempat.
- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat
- c. terhadap program dan kegiatan pembangunan di desa.
- d. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa,
- e. Menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa.

Adapun yang menyebabkan munculnya program pembangunan di desa Labuang Rano adalah : Dalam rangka mewujudkan pembangunan dengan menekankan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, maka kebutuhan mendasar yang perlu di benahi salah satunya adalah pembenahan dari segi proses perencanaan. Seiring dengan perubahan paradigma pembangunan maka perencanaan partisipatif menjadi suatu pendekatan yang merupakan pilihan yang tepat saat ini. Untuk menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat maka kedua komponen ini perlu keterlibatan bersama dalam pelaksanaan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai monitoring dan evaluasi pembangunan. Dalam menyusun perencanaan bersama tingkat desa , maka beberapa manfaat dan pendekatan ini, adalah berupa

Tinjauan Perencanaan Tingkat Desa Di Desa Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju

; peningkatan dan segi efisiensi, efektifitas, menjalin kemitraan, memberdayakan Masyarakat, meningkatkan ketepatan kelompok sasaran, berkelanjutan, pemberdayaan kelompok marjinal dan peningkatan akuntabilitas. Sejalan dengan tuntutan tersebut di atas, perlu segera diupayakan beberapa langkah strategis dan tindakan-tindakan operasional untuk merealisasikannya. Salah satu langkah yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu pemerintahan yang baik (good governance) yang memiliki elemen dasar transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Sebagai aplikasi dan uraian di atas, maka perlu dibuat Rencana Pembangunan yang memuat rencana kerja lima tahunan yang akan dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang dikenal dengan RPJM-DES Desa Labuang Rano Tahun 2015-2021.

3. Adapun keterkaitan program perencanaan pembangunan masyarakat dengan :
 - a. pembangunan daerah.
 - b. perencanaan pembangunan pmpn
 - c. Modal Sosial dan gerakan social
 - d. Kebijakan dan perencanaan sosial Sangat mendukung dengan kerja sama pemerintah dan masarakat program perencana pembangunan daerah berjalan dengan baik
4. Adapun program pelaksanaan perencanaan pembangunan di Desa labuang rano. Berjalan dengan baik karena pihak pemerintah dan masyarakat menjalin hubungan baik dalam pelaksanaan
5. Tindak lanjut pembangunan ke depan masyarakat dan pemerintahan desa labuang rano ingin mengembang kan daerah lebih cepat agar tidak tertinggal berhubung dengan desa labuang rano dekat dengan kecamatan tappalang barat serta kabupaten, dan provinsi mamuju
6. FGD (Focus Group Discussion) pelaksanaan fgd Waktu dalam penelitian ini FGD dilangsungkan selama 60–120 menit dan dilakukan 1 kali . Frekuensi sesuai dengan kebutuhan penelitian, sumber dana, kebutuhan pembaharuan informasi, cepat pola peserta terbaca. Dilakukan dengan memakan waktu cukup lama karena semua informasi masih baru. Adapun peserta yang hadir pada saat pelaksanaan FGD adalah :
 - a. Aparat Desa
 - b. Ketua / Pengurus RW
 - c. Ketua/ Pengurus RT
 - d. Tokoh Masyarakat
 - e. Tokoh Agama

Yang bertindak sebagai moderator adalah : peneliti pembawa materi hamzah mika selaku (kepala desa) materi yang peneliti angkat dalam FGD

- a. Identifikasi kebutuhan, masalah dan potensi (berdasarkan temuan hasil pemetaan sosial dan evaluasi program pengembangan daerah)
- b. Penyusunan program perencanaan pembangunan daerah khususnya desa labuang rano?

Menurut aparat desa tentang Identifikasi kebutuhan, masalah dan potensi (berdasarkan temuan hasil pemetaan sosial dan evaluasi programpengembangan daerah) adalah sementara proses perbaikan penataan social. Menurut Tokoh Masyarakat tentang Penyusunan program perencanaan pembangunan daerah khususnya desa labuang rano adalah penyusunan program perencanaan pembangunan di desa labuang rano sudah di rangsang dengan baik hanya saja pelaksanaan nya belum akurat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan mengenai tinjauan perencanaan tingkat desa di desa labuang rano kecamatan tapalang barat kabupaten mamuju dapat diambil kesimpulan

1. RPJM-Desa Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat Tahun 2015-2021 ditetapkan dengan peraturan desa yang memuat kebijakan dan pokok – pokok rencana pembangunan desa yang memuat kebijakan dan pokok-pokok rencana pembangunan desa yang bersifat strategis untuk menjadi aturan penyusunan RKP Desa.
2. Untuk mewujudkan visi dan misi Desa Labuang Rano maka penjabaran RPJM-Desa secara operasional dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya dijabarkan kedalam bentuk program dan kegiatan kongkrit, terarah, transparan dan penuh tanggung jawab.

Saran

Tinjauan Perencanaan Tingkat Desa Di Desa Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat Kabupaten Mamuju

Berdasarkan uraian hasil penelitian maupun pembahasan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. RPJM-Desa Labuang Rano Kecamatan Tapalang Barat Tahun 2015-2021 dapat berjalan dengan baik
2. Untuk mewujudkan visi dan misi Desa Labuang Rano maka masyarakat dan pemerintah desa harus selalu menjalin kerja sama dengan baik .

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried, 2007. *Metode Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Hills, Conyers 1994. *Perencanaan Pembangunan*, Alfabeta, Bandung
- Kansil, C.S.T (1983:251). *Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pembangunan Desa*. Jakarta: Ghalia Nasional.
- Kartasasmita, Ginandjar, 2001. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*, Jakarta : Pustaka CIDESINDO
- Lincoln Arsyad 2010, *Ekonomi Pembangunan*, Edisi kelima, STIM YKPN, Yogyakarta.
- Siagian, 1994, *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: PT Bumi Angkasa
- Siagian, P.S (1981:21). *Teori dan Praktek Kepemimpinan*. Jakarta Rineka Cipta.
- Sudirwo, D. (1981). *Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah Dan Pemerintah Desa*. Bandung: Aksara
- Torado, 1977, *Pembangunan Ekonomi di Dunia ketiga*, jakarta: penerbit Erlangga